



**PENGUATAN GANDENG GENDONG**

## Wilayah Diminta Susun Pengurus Kampung

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Wilayah kampung di Kota Yogyakarta diminta menyusun pengurus kampung. Pembentukan pengurus kampung untuk mendukung pembangunan di Kota Yogyakarta yang berbasis kampung. Termasuk untuk menguatkan program Gandeng Gendong.

"Pengurus kampung ini bukan berarti menghidupkan kembali Rukun Kampung (RK). Tetapi sebatas pengurus kampung saja. RK sudah tidak ada," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Yogyakarta, Zenni Lingga, Senin (3/12).

Dasar pembentukan pengurus kampung itu ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018. Di dalam peraturan itu kampung yang dimaksud adalah bekas rukun kampung yang pernah ada di Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 170 kampung.

Susunan pengurus kampung terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi pembangunan fisik, seksi pembangunan nonfisik serta seksi data dan teknologi informasi. Susunan pengurus kampung itu akan ditetapkan melalui surat keputusan lurah setempat.

"Kami masih terus melakukan sosialisasi ke wilayah mengenai pembentukan pengurus kampung. Targetnya paling lambat pekan ketiga Desember seluruh kampung sudah menyusun pengurus kampung," jelasnya.

Pihaknya menegaskan keberadaan pengurus kampung tidak akan mengambil alih peran pengurus RT/RW karena tugasnya berbeda. Menurutnya pengurus kampung akan lebih banyak bermitra dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terkait program pembangunan. Sedangkan RT/RW lebih berperan untuk pelayanan masyarakat.

"Kami harap posisi ketua pengurus kampung bukan diisi warga yang sudah rangkap jabatan RT maupun RW. Tidak rangkap LPMK juga karena pengurus kampung akan bermitra dengan LPMK," papar Zenni.

Dia menyatakan pembentukan pengurus kampung juga menjadi bagian dari percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat dengan Gandeng Gendong. Salah satu unsur program itu adalah melibatkan kampung.

"Selama ini program pembangunan di Kota Yogyakarta berbasis pada RT dan RW. Tapi cakupan wilayahnya kecil, sehingga diarahkan ke kampung yang memiliki wilayah lebih luas," pungkas Zenni. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005